

RASIONALITAS MEMILIH TRANSAKSI DENGAN BANK SYARIAH (Perspektif Teori Bounded Rationality)

M. Firmansyah¹, Agus Suman² dan Asfi Manzilati Susilo²

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Mataram
Jl. Majapait No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat Email: firman_mtr@yahoo.com

² Fakultas Ekonomi Universitas Brawajaya
Jl. Jl. M. T. Haryono No. 165 Malang, East Java
Email: agussuman@yahoo.com Asfi_manzilati@yahoo.com

Abstract

Rational concept of NIE `bounded rationality developed by Herbert Simon is a synthesis of the theory of rationale choice of Neo-classic "utility maximization" and "self-interest" and rational concept based on habits and routines developed by Thorstein Veblen; old institutional economics. The concept of bounded rationality describes the rationale to choose is formed by two human bounds called the bound of absorptive information and the cognition in the middle of social life complexity. In the context of syariah banking, even though the majority of population of indonesia is a moeslem but the syariah banking development is not optimal compared to conventional banking, however, this paper emphasized on the obstacles of choosing the transaction of syariah banking from NIE perspective

Keywords: NIE, Bounded rationality, rational choice and Syariah banking

1. Pendahuluan

Setelah MUI mengeluarkan fatwa haram bunga bank pada 16 Desember 2003 menjadi cikal bakal berkembangnya bank syariah di tanah air, walaupun bank syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat) terbentuk pada 1 November 1991. Pada saat itu, bermunculan unit-unit syariah dari bank konvensional setelah regulasi pemerintah yang semakin baik dalam sistem bagi hasil pada tahun 1999, di mana ada sekitar 37 bank dengan transaksi syariah saat itu (Solihin, 2008: 12-13), Namun demikian bank syariah belum menunjukkan perkembangan yang pesat saat itu. Pertumbuhan bank syariah tercatat mengalami *booming* pasca fatwa haram bunga bank dikeluarkan MUI. Total aset bank Syariah pada tahun 2004 tercatat Rp 15,33 triliun, meningkat menjadi Rp 26,72 triliun di tahun 2006, dan saat ini diperkirakan aset bank syariah mencapai lebih dari Rp 145 triliun.

Dengan jumlah aset tersebut, maka *share* atau pangsa pasar bank syariah masih sekitar 4,5 persen. Tentu pangsa pasar ini masih jauh dari proporsional bila dilihat dari kenyataan *pertama*,

250 juta jiwa penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, *kedua* bank Syariah tentu lebih stabil dan menguntungkan dibanding dengan bank-bank konvensional, sehingga di luar negeri perkembangan bank syariah semakin baik. Menurut Syafii Antonio, salah satu penyebab masih rendahnya pangsa bank syariah adalah kurangnya sosialisasi dan periklanan, Syafii Antonio mengatakan bank syariah tidak mampu membayar periklanan setiap waktu di TV yang membutuhkan dana ratusan miliar¹. Senada dengan Syafii Antonio, menurut Sekjen masyarakat ekonomi Syariah (MES), H Sakir Kula, bahwa iklan bank syariah dalam satu tahun sama dengan nilai iklan bank swasta konvensional untuk satu bulan².

Disadari memang, serapan informasi adalah salah satu aspek penentu keputusan individu, apapun keputusan itu, termasuk dalam memilih bertransaksi dengan bank syariah. Namun informasi yang memadai dalam hal ini bukanlah

¹ <http://www.infobanknews.com/2013/01/sosialisasi-bank-syariah-butuh-biaya-besar/>

² <http://m.pikiran-rakyat.com/node/214361>

satu-satunya penentu keputusan individu. Dalam ilmu ekonomi, perdebatan konsep (teori) rasionalitas dalam keputusan memilih (*rational choice*) terbangun dari beberapa bentuk rasionalitas perilaku, yaitu berbasis maksimalisasi utilitas dan *self interest* versi neo-klasik, berbasis rutinitas dan kebiasaan versi *Old Institutional Economics (OIE)* dan konsep *Bounded Rationality* Versi Herbert Simon "*New Institutional Economics (NIE)*" yang menggambarkan bahwa rasionalitas keputusan individu dibangun atas dasar dua sisi keterbatasan, yaitu keterbatasan informasi dan kognisi. Sehingga, bila dihubungkan dengan perspektif terakhir di atas, maka hambatan individu bertransaksi dengan bank syariah di samping ditentukan oleh keterbatasan informasi diduga juga karena kemampuan kognisi individu.

Neo-klasik menganggap bahwa setiap individu selalu berperilaku rasional dalam setiap keputusan, dengan menerapkan kalkulasi *benefit-cost* setiap keputusan dalam rangka memaksimalkan kepuasan (*utility maximization*). Dari konteks ini, manusia dianggap sebagai *economics man (homo economicus)* artinya manusia akan terus berperilaku dalam rangka *rent seeking*, bekerja pada dunia *zero transaction cost* tanpa memasukan peran kelembagaan (Landa dan Wang, 2002). Pemahaman neo-klasik yang mengedepankan *self-interest* dan sifat maksimalisasi utilitas dengan mengabaikan aspek kelembagaan berupa tata aturan, nilai-nilai dan norma mendapat kritikan dari pemikir ekonomi kelembagaan, Thortain Veblen dan pendukungnya. Veblen menganggap perilaku manusia tidak saja dipengaruhi rasionalitas *self interest* namun juga dipengaruhi oleh nilai-nilai atau tata aturan yang berkembang dalam masyarakat atau yang dikenal sebagai tata kelembagaan (*institution*), sehingga Veblen menganggap rasionalitas perilaku manusia dibangun berdasar rutinitas dan kebiasaan sebagai bagian dari kelembagaan yang ada dalam lingkungannya.

Sintesis dari tesis peikiran neo-klasik dan anti tesis pemikiran ekonom kelembagaan lama (OIE), memicu berkembangnya aliran pemikiran baru yang disebut New Institutional Economics (NIE). Salah satu cabang pemikiran NIE adalah pemahaman rasionalitas perilaku, yang satu sisi mengambil peran neo-klasik khususnya dalam metodologi dan juga OIE dalam konsep dasar

perilaku yang berbasis kelembagaan. Tokoh NIE, Herbert Simon sebagai pencetus gagasan *bounded rationality* menganggap bahwa manusia memang terbatas, Simon mengganti maksimalisasi ala neo-klasik dengan satisfaksi "kecukupan" dengan alasan tidak ada manusia yang mampu memaksimalkan utilitasnya di tengah berbagai keterbatasan, berupa serapan informasi dan kognisi, manusia hanya mampu sebatas mensatisfaksi kepuasannya, yaitu satu level di bawah optimalisasi. Sehingga, salah satu pengganti berbagai keterbatasan dalam individu berperilaku seperti pandangan pendahulunya (OIE) adalah berdasar kebiasaan dan rutinitas yang berkembang dalam lingkungan di mana individu itu tinggal, sekaligus kebiasaan dan rutinitas dapat menggantikan perilaku kalkulasi yang dipaparkan neo-klasik.

Dengan demikian, paper ini mencoba membahas bagaimana penjelasan dua keterbatasan ini menjadi penyebab keterbatasan keputusan bertransaksi dengan bank syariah. Paper ini bukanlah studi empiris (lapangan), namun cenderung merupakan studi pustaka berupa telaah konsep yang dapat pula dikembangkan menjadi studi empiris di masa yang akan datang, atau menjadi jalan awal untuk memahami konteks perilaku individu dalam menentukan keputusan. Bagian *pertama* paper ini menjelaskan pendahuluan, *kedua* tinjauan singkat konsep *bounded rationality*, *ketiga* kendala informasi, *keempat* keterbatasan kognisi dan terakhir kesimpulan dan saran

Bounded Rationality

Herbert Simon mendaulat diri sebagai "nabi"-nya *bounded rationality*, dan memang benar bahwa dalam ilmu ekonomi setiap dibicarakan konsep *bounded rationality* maka akan tertuju pada seorang Herbert Simon (Barros, 2010). Paper Simon tahun 1950an telah menginspirasi ilmuan terkait konsep ini (Rubinstein, 1998: 3), yang kemudian menunjukkan bahwa studi empiris sangat penting dalam dunia nyata (Kamarck, 2005: 64). Dalam perkembangannya, konsep *bounded rationality* telah dibuktikan dalam berbagai pekerjaan yang mengesankan (Conlisk, 1999).

Substansi dari *bounded rationality* adalah keterbatasan manusia dalam mengelola informasi dan menyelesaikan persoalan (Wayland, 2006:

36) yang digunakan dalam memutuskan sesuatu tindakan dalam kehidupan, karena manusia sebagai *decision maker* menghadapi keterbatasan informasi, perhatian dan kemampuan memproses informasi (Greve, 2003: 12). Sebagai pencetus konsep *bounded rationality*, Simon (1957) menjelaskan:

The alternative approach employed in these papers is based on what I shall call the principle of bounded rationality: The capacity of the human mind for formulating and solving complex problems is very small compared with the size of the problems whose solution is required for objectively rational behavior in the real world or even for a reasonable approximation to such objective rationality. (Barros, 2010)

Alasan mendasar mengapa orang membatasi jumlah penalaran yang mereka gunakan ketika harus membuat keputusan adalah (Kamarck, 2005: 65): Mereka membatasi kemampuan analitis, dan memang ada keterbatasan pengetahuan individu bersangkutan yang tersedia, mereka ingin menghemat upaya kognitif yang diperlukan, mereka tidak ingin menghabiskan waktu yang dibutuhkan menggali informasi yang diperlukan dan membuat keputusan yang optimal. Sehingga pertanyaan mendasar dalam memahami *bounded rationality* adalah *how do people make decisions in the real world, where time is short, knowledge lacking, and other resources limited?* (Gigerenzer, 2000:125)

Gagasan *bounded rationality* dibangun melalui langkah-langkah berikut (Dequech, 2001): individu atau organisasi sering mengejar beberapa tujuan, yang mungkin bertentangan. Alternatif pilihan untuk mengejar tujuan itu sebelumnya tidak diberikan kepada pengambil keputusan, dengan demikian perlu mengadopsi suatu proses untuk menghasilkan alternatif, selanjutnya ada batas-batas kapasitas mental pembuat keputusan dibandingkan dengan kompleksitas lingkungan dalam pengambilan keputusan, sehingga karena berbagai keterbatasan itu menyebabkan pembuat keputusan mengadopsi "*satisficing*" daripada strategi mengoptimalkan, mencari solusi yang "cukup baik" atau memuaskan, dan diberikan beberapa tingkat aspirasi. Pemahaman lain adalah bahwa prinsip *bounded*

rationality yaitu kapasitas dari pikiran manusia untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang kompleks sangat kecil dibandingkan dengan ukuran masalah dan solusinya, atau dengan kata lain ada ketidakmampuan individu untuk mengekstrak informasi (Keiber, 2008). Dengan demikian, manusia dihadapkan dengan kompleksitas informasi dan keterbatasan kognisi dalam mengolah informasi sehingga memutuskan secara terbatas rasionalitas dari setiap keputusan.

Bank Syariah dan Kendala Informasi

Kebanyakan penelitian atau pandangan terkait persoalan kurangnya minat masyarakat bertransaksi dengan bank syariah adalah selalu dianggap kurangnya informasi dan sosialisasi akan bank dan produk-produk syariah. Untuk mengatasi itu, Ketua Dewan Masjid M Jusuf Kalla memberikan solusi yang baik bahwa setiap perbankan syariah dapat membuka kantor di setiap mesjid dengan konsep "bank syariah di seribu mesjid", dengan tujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bank syariah³. Menurut Deputy Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo Bidang Perbankan Y. T Herlambang bahwa ketidaktahuan masyarakat akan segmen yang digarap bank syariah yang sebenarnya luas adalah lebih kepada kurangnya edukasi ke masyarakat tentang apa dan bagaimana bank syariah itu⁴. Sehingga, kekurangan informasi menyebabkan persepsi masyarakat terbentuk sedemikian rupa tanpa teruji kebenarannya, menurut Solihin (2011) persepsi adalah hal urgent yang harus diperhatikan dalam rangka mengukur, merencanakan, dan menerapkan strategi pengembangan bank syariah di bidang apapun⁵.

Adalah betul Bank Syariah dan produk-produknya tidak banyak dipahami oleh kebanyakan masyarakat (muslim umumnya), sehingga menyulitkan untuk bertransaksi dengan bank syariah. Karena rendahnya informasi yang diserap itu menyebabkan masyarakat sedikit ragu akan keamanan uang mereka, dan mempertanyakan berbagai keuntungan yang diperoleh

³ [Http://Bisnis.Liputan6.Com/Read/525434/Bank-Syariah-Diajak-Buka-Kantor-Di-1000-Masjid](http://Bisnis.Liputan6.Com/Read/525434/Bank-Syariah-Diajak-Buka-Kantor-Di-1000-Masjid)

⁴ [Http://Suaramerdeka.Com/V1/Index.Php/Read/News/2011/12/11/103962/Pemahaman-Tentang-Bank-Syariah-Masih-Kurang](http://Suaramerdeka.Com/V1/Index.Php/Read/News/2011/12/11/103962/Pemahaman-Tentang-Bank-Syariah-Masih-Kurang)

⁵ [Http://Ekonomi.Kompasiana.Com/Moneter/2011/06/16/Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Bank-Syariah-373618.Html](http://Ekonomi.Kompasiana.Com/Moneter/2011/06/16/Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Bank-Syariah-373618.Html)

dalam bertransaksi dengan bank syariah, juga masyarakat mempertanyakan kemudahan-kemudahan dalam transaksi syariah dibanding bank konvensional, karena setiap perpindahan (transaksi konvensional ke syariah) ini tentu akan memunculkan biaya transaksi bagi nasabah. Belum lagi berkembang pemikiran yang mendiskreditkan bank syariah oleh beberapa kalangan, misalnya dengan menganggap identitas “syariah” hanyalah tehnik pemasaran saja yang sesungguhnya dalam praktek tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, ada pula yang mempersoalkan bahwa sekarang ini banyak berkembang unit syariah namun kebanyakan induknya bank konvensional, sehingga dipertanyakan bagaimana menjamin bahwa keuangan antara induk-anak itu tidak saling tercampur.

Dalam teori ekonomi, pembuat keputusan yang rasional adalah karakteristik dari agen yang memiliki keputusan rasional setelah melakukan pertimbangan dengan mempertanyakan: apa yang layak, apa yang diinginkan dan alternatif apa yang terbaik dalam mempertimbangkan kelayakan itu (Rubinstein, 1998: 7), sehingga bila informasi kurang memadai atau tidak akurat bagaimana agen menentukan berbagai alternatif terbaik sesuai kebutuhannya. Namun demikian, bila sebelumnya salah satu kendala adalah mahalnya informasi (*costly*), namun setelah teknologi informasi berkembang dengan pesat dalam beberapa dekade terakhir, informasi menjadi lebih murah (walau tetap bukan *zero transaction cost*), sehingga teori informasi aktor rasional membutuhkan teori signal dan pengirim, tidak membutuhkan teori penerima.

Namun dalam teori informasi modern, justru yang dibutuhkan adalah teori penerima karena begitu banyaknya informasi yang berkembang dan pentingnya bagi penerima memperoleh informasi yang benar dan akurat. Dengan berbagai informasi yang melimpah bahkan *overload*, sehingga menurut Simon (1996) sumber daya yang langka bukanlah informasi melainkan perhatian (Jones, 1999). Dengan demikian, kekurangan informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan karena terbatasnya informasi namun lebih kepada kurangnya perhatian akan informasi yang dimaknai sebagai keterbatasan kognitif (akan dibahas sub bab berikutnya).

Bila dianggap kekurangan informasi adalah salah satu penyebab, maka ada beberapa penyebab informasi kurang terserap baik oleh masyarakat terkait transaksi dengan bank syariah. *Pertama* kurangnya mengiklankan bank syariah dan produk-produknya sehingga persepsi akan bank syariah berkembang kemana-mana, *kedua*, kurangnya sosialisasi bank syariah sehingga kehadiran bank syariah benar-benar belum terasa oleh masyarakat, *ketiga*, masih minimnya bank dan unit syariah di beberapa daerah di mana pemekaran wilayah tidak diikuti oleh penambahan bank, khususnya bank syariah, *keempat* kurangnya dukungan pemerintah, di mana bahkan untuk pembayaran haji yang merupakan bagian dari ritual ibadah dalam Islam masih dilimpahkan pada bank konvensional.

Kendala Kognisi

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa persoalan utama kurangnya masyarakat bertransaksi dengan bank syariah bukan hanya karena kurangnya atau keterbatasan informasi namun lebih kepada terbatasnya perhatian dan pengelolaan informasi tersebut. Dalam konteks ini *bounded rationality* disamping dibangun berdasar keterbatasan informasi juga dibangun atas dasar keterbatasan kognisi (akal). Di antara Keynes dan Simon sama-sama mengkritisi konsep neo-klasik dari aspek kognitif dalam sebagai alasan motivasi (Dequech, 2001). Rasionalitas berbasis kognitif adalah menggunakan penalaran dan pengetahuan untuk memutuskan keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan (Natanson, 1993: 1). Karena agen tidak dapat mengumpulkan dan memproses informasi yang diperlukan untuk mencapai hasil maksimal, mereka menjadi kurang puas sehingga dianggap sebagai keterbatasan kognitif. Manusia terbatas dalam pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan waktu untuk pencapaian tujuan manusia (Makki, 2005: 14). Pemahaman lain mengatakan manusia bukanlah kalkulator yang baik, untuk mengkal-kulasi *benefit-cost* sebelum berperilaku.

Kemampuan kognisi yang terkait dengan bank syariah ini adalah perhatian dan pemahaman akan ilmu agama yang dianut, khususnya terkait dengan transaksi islami. Artinya perilaku bertransaksi secara syariah harusnya tidak saja dibentuk oleh mencari kemudahan, mencari

untung atau hal-hal material lain, namun karena dorongan nilai illahiah, dalam konteks rasionalitas islam disebut sebagai *autonomous rationality* berbasis *God's Will* (Cattelan, 2013). Rasionalitas ini menunjukkan sejatinya kehidupan seorang muslim akan sejalan dengan kehendak Allah SWT (Armstorong, 2002: 6).

Sehingga, lebih penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami keterbatasan kognisi ini dari pada sekedar menganggap kurangnya informasi dan sosialisas sehingga berusaha gencar memberi informasi (periklanan) atau sosialisasi dengan anggaran ratusan milliar. Rasionalitas dalam islam terbangun dalam tiga tahapan, yaitu al-Nafs al Amarah, Al-Nafs Al-Mawamah dan Al-Nash Al-Mutmainah (Hoetoro, 2007: 237). Sehingga rasionalitas perilaku ditentukan oleh derajat pengetahuan dan keimanan seseorang. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang maka semakin banyak mempraktekan nilai-nilai keimanan itu dalam kehidupannya sehari-hari, tidak saja dalam konteks ibadah rutin namun seluruh aspek kehidupan harian seorang muslim. Sehingga, kurangnya masyarakat muslim bertransaksi dengan bank syariah dapat diduga sebagai bentuk masih kurangnya perhatian umat akan praktek-praktek syariah tersebut.

Foucault (1984) dalam penelitiannya terkait masyarakat, kekuasaan, dan etika menjelaskan sistem nilai individu diciptakan dan ditentukan oleh budaya di mana mereka tinggal, lebih jauh menurut Foucault untuk memahami kognisi etika perilaku individu kita harus memahami bagaimana budaya perilaku, nilai-nilai, dan keyakinan kultural diposisikan (Jurkiewicz, 2007), dengan demikian untuk memahami kesalehan individu dapat dilihat dari kesalehan lingkungannya. Budaya atau kebiasaan lingkungan yang islami akan menciptakan praktek-praktek islami dari masing-masing individu, sehingga tugas pemangku kebijakan untuk kembali menegakkan nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat sebagai *the rule of life*.

Namun demikian, patut juga menjadi perhatian bahwa keimanan atau kesholehan saja tidak menjamin orang melakukan praktek-praktek syariah tanpa pengetahuan, informasi dan perhatian yang mumpuni akan konsep dan perkembangan praktek syariah tersebut. Adakalanya undividu dikenal kesalehanya (beriman)

dalam masyarakat namun keterbatasan pemahaman dan pengetahuan akan praktek syariah menyebabkan terhalangnya individu itu menafsirkan dan mempraktekan dengan benar kaidah-kaidah syariah tersebut. Hal ini dapat dipahami, di mana pendidikan islam baik di sekolah dasar sampai perguruan tinggi masih ditekankan pada ibadah rutin, halal haram, atau berbagai kewajiban ritual lainnya, yang berkaitan dengan transaksi (ekonomi) walaupun ada masih relatif terbatas. Bahkan khotbah Jumat yang merupakan moment yang tepat dalam transfer pengetahuan agama terhadap umat khususnya perilaku transaksi syariah ini sangat jarang mengungkap konsep atau bentuk-bentuk transaksi dalam islam. Sehingga, ada anggapan dengan melakukan ibadah yang rajin sebagian menganggap sudah menunjukkan kesolehan atau keimanan tersebut.

Oleh karena itu, sebenarnya praktek bank syariah tidak bisa dipisahkan dari aspek kehidupan beragama masyarakat kita. Praktek syariah adalah satu paket dengan ibadah sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya, sehingga bila masyarakat memahami ini secara baik, tidak perlu bagi bank syariah intens melakukan periklanan atau sosialisasi, individu akan mencari perilaku terbaik (syariah) atas dorongan iman dan nilai-nilai agama. Namun, demikian kewajiban dari bank syariah adalah menyampaikan informasi yang menyeluruh akan praktek atau produk-produk bank syariah sehingga kombinasi pencarian berdasar keimanan dan informasi yang memadai dari bank syariah menjadikan masyarakat semakin yakin dan nyaman bertransaksi dengan bank syariah. Praktek bank syariah di barat tentu bukan berdasar dorongan keimanan namun berdasar keuntungan dan keamanan yang lebih baik dalam transaksi syariah, sehingga tentu akan menjadi potensi yang luar biasa bila di negara kita yang mayoritas muslim ini disamping bank syariah memberi kestabilan dengan profesionalitas kerja dan yang terpenting ada kesadaran kolektif yang bersumber dari dorongan nilai-nilai keimanan sehingga memilih transaksi syariah.

Sehingga, seperti yang dijelaskan Simon bahwa sumber daya yang langka adalah perhatian bukanlah informasi (Jones, 1999) dipertegas oleh Grave (2003: 12), maka pertanyaannya bagaima-

mana menjadikan masyarakat perhatian dengan transaksi syariah. *Pertama*, pendidikan agama seharusnya tidak saja membahas terkait ibadah rutin, namun muamalah (transaksi syariah) perlu mendapat perhatian lebih bagi pemangku kepentingan, *kedua*, pendidikan itu tidak sekedar teori di kelas namun dipraktikkan dalam kehidupan nyata, *ketiga*, usulan Pak Jusuf Kalla untuk membuka cabang di setiap mesjid adalah langkah positif mendekatkan (secara fisik dan pemahaman) masyarakat dengan bank syariah, *keempat*, perlu diskusi-diskusi intens dalam menyampaikan bank syariah dan produknya dalam bentuk kajian-kajian rutin mesjid, khotbah jumat terutama untuk menjelaskan berbagai produk-produk bank syariah yang umumnya tidak banyak dipahami masyarakat.

Kesimpulan dan saran

Akhirnya, anggapan bahwa masih rendahnya pangsa pasar bank syariah dibandingkan bank konvensional karena kurangnya informasi lewat iklan dan sosialisasi dalam konteks teori *bounded rationality* adalah bukan satu-satunya penyebab. Era globalisasi menyebabkan informasi menjadi relatif lebih murah (*low cost*) sehingga mudah bagi siapapun mengakses informasi apapun (termasuk terkait bank syariah) sesuai dengan yang diinginkan. Benar ungkapan Herbert Simon bahwa sumber daya yang langka bukanlah informasi namun perhatian akan informasi, sehingga keterbatasan bertransaksi dengan bank syariah lebih kepada kemampuan mengolah informasi akan bank syariah dan produknya atau disebut keterbatasan kognisi.

Keterbatasan kognisi ini dapat pula disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, dalam konteks ini pengetahuan agama. Karena transaksi syariah merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengetahuan agama, keterbatasan itu menyebabkan sebagian masyarakat (muslim) belum terdorong untuk melakukan transaksi syariah. Hal ini disebabkan pendidikan agama (formal dan non formal) di tanah air masih sedikit yang mengungkap transaksi syariah secara teoritis dan praktis.

Oleh karena itu, pendidikan agama di tanah air sebaiknya diberikan porsi yang cukup untuk pembahasan-pembahasan muamalah ini, baik

secara teori maupun prakteknya. Demikian pula, dalam khotbah jumat atau pengajian-pengajian rutin juga perlu diperdalam pembahasan tentang transaksi syariah. Harapannya, masyarakat muslim memahami bahwa mengikuti transaksi syariah adalah wajib bukan sekedar karena dorongan mencari keuntungan atau kenyamanan semata namun berdasar *God's Will* (Allah SWT).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Solihin, 2008. *Iniloh*, Bank Syariah. PT. Grafindo Media Pratama. Jakarta
- Armstrong, K. 2002. *Islam A Short History*. Modern Library: New York
- Brandt, R.B, *Rationality, Rules, And Utility New Essays On The Moral Philosophy*. Of Edited By Brad Hooker. Stephen Nathanson: Brandt On Rationality And Value
- Barros, G, 2010. Herbert A. Simon And The Concept Of Rationality: Boundaries And Procedures Brazilian Journal Of Political Economy, Vol. 30, No. 3 (119), Pp. 455-472.
- Conlisk, J, 1996. Why Bounded Rationality?. *Journal Of Economic Literature* 34. 2 : 669.
- Cattelan, C, 2013. Shariah Economics As Autonomous Paradigm: Theoretical Approach and Operative Outcomes. *Proceeding Of Sharia Economics Conference, Hannover 9 February 2013*
- Dequech, D 2001. Bounded Rationality, Institutions, and Uncertainty. *Journal Of Economic Issues* Vol. Xxxv No. 4
- Greve, H R, 2003. *Organizational Learning from Performance Feedback A Behavioral Perspective on Innovation and Change*. Cambridge Univ. Press: New York
- Gigerenzer, G 2000. *Adaptive Thinking Rationality In The Real World*. Oxford university Press. UK
- Jurkiewicz, C. L., 2007. Ethical Culture And Its Effect on the Administrative Failures Following Katrina. *Public Administration Review*. Special Issue. December 2007
- Hoetoro, A. (2003). *Ekonomi Islam: Pengantar*

Analisis Kesejarahan dan Metodologi.
Malang: Bayumedia Publishing

[Http://Suaramerdeka.Com/V1/Index.Php/Read/News/2](http://Suaramerdeka.Com/V1/Index.Php/Read/News/2)

011/12/11/103962/Pemahaman-Tentang-Bank-Syariah-Masih-Kurang (akses tanggal 5 Maret 2013)

[Http://Ekonomi.Kompasiana.Com/Moneter/2011/06/16/Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Bank-Syariah-373618.Html](http://Ekonomi.Kompasiana.Com/Moneter/2011/06/16/Persepsi-Masyarakat-Terhadap-Bank-Syariah-373618.Html) (akses tanggal 5 Maret 2013)

[Http://Bisnis.Liputan6.Com/Read/525434/Bank-Syariah-Diajak-Buka-Kantor-Di-1000-Masjid](http://Bisnis.Liputan6.Com/Read/525434/Bank-Syariah-Diajak-Buka-Kantor-Di-1000-Masjid) (Akses tanggal 5 Maret 2013)

<http://www.infobanknews.com/2013/01/sosialisasi-bank-syariah-butuh-biaya-besar/> (akses 4 Maret 2013)

<http://m.pikiran-rakyat.com/node/214361> (Akses 4 Maret 2013)

[Http://Bisnis.Liputan6.Com/Read/525434/Bank-Syariah-Diajak-Buka-Kantor-Di-1000-Masjid](http://Bisnis.Liputan6.Com/Read/525434/Bank-Syariah-Diajak-Buka-Kantor-Di-1000-Masjid)

Jones, B D, 1999. Bounded Rationality., *Annu. Rev. Polit. Sci.* 2: 297–321

Keiber, KL, 2008. Price Discovery In The Presence Of Boundedly Rational Agents. *Quantitative Finance*, Vol. 8, No. 3: 235–249.

Kamarck, A.M, 2005. *Economics As A Social Science An Approach To Nonautistic Theory.* By The University of Michigan: New York

Landa, J, T dan Wang, X.T., 2002. Bounded rationality of Economics Man: Decision Making under Ecological, social and institutional constraints. *Journal of Bioeconomics*; 2001; 3: 217-235

Mäki, U, 2005. *Economics With Institutions: Agenda For Methodological dalam Enquiry Rationality, Institutions And Economic Methodology.* Mäki, U, Gustafsson, B & Knudsen, C (Eds). Taylor & Francis E-Library: London

Rubinstein, R, 1998. *Modeling Bounded Rationality.* MIT Press: Cambridge, Massachusetts London dan England

Weyland, K, 2006. *Bounded Rationality And Policy Diffusion Social Sector Reform In*

Latin America Princeton University Press: Princeton And Oxford

BIOGRAFI PENULIS

M. Firmansyah adalah dosen di Jurusan IESP Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, NTB. Beliau mendapatkan gelar Magister Sains Ilmu Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 2006. Sekarang menjadi Mahasiswa Akhir program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi melalui: firman_mtr@yahoo.com

Agus Suman adalah dosen dan Guru Besar di Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Beliau menyelesaikan Studi PhD di Universite Pierre Mendes Frence, Grenoble, Frence pada tahun 1995. Keahlian beliau pada Ekonomi Pembangunan. Konfirmasi lebih lanjut dapat dihubungi melalui agussuman@yahoo.com

Asfi Manzilati adalah dosen di jurusan IESP FEB Universitas Brawijaya Malang. Beliau menyelesaikan program Doktor di FEB Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2009. Beliau dari tahun 2010 sampai sekarang adalah ketua program studi ekonomi islam di FEB universitas Brawijaya. Konfirmasi lebih lanjut dapat dihubungi melalui asfi_manzilati@yahoo.com

Susilo adalah dosen di jurusan IESP FEB Universitas Brawijaya Malang. Beliau menyelesaikan program doktor di FEB Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2004. Beliau adalah Ketua Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah (PK2ND) Fakultas Ekonomi Unibraw Malang.